

**IMPLIKASI YURIDIS MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 154/PUU-
XXIII/2025 TERHADAP SYARAT MINIMAL PENDIDIKAN
PEJABAT PUBLIK DALAM PERSPEKTIF
MERITOKRASI**

SKRIPSI

Oleh

Arini Mayang Fauni

NIM. 05010422005



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arini Mayang Fauni
NIM : 05010422005
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-
XXIII/2025 tentang Syarat Minimal Pendidikan Pejabat
Publik dalam Perspektif *Good Governance*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 10 Februari 2026

Y.

10000
METERAI
TEMPEL
16F9FANX261460793
Arini Mayang Fauni
NIM. 05010422005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Arini Mayang Fauni

NIM : 05010422005

Judul : Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 Tentang Syarat Minimal Pendidikan Pejabat Publik Dalam Perspektif *Good Governance*

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 09 Februari 2026

Pembimbing



Achmad Safudin R., M.H.
NIP. 199212292019031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Arini Mayang Fauni

NIM. : 05010422005

Judul : Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 Tentang Syarat Minimal Pendidikan Pejabat Publik Dalam Perspektif Meritokrasi

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Achmad Safiudin R., M.H.

NIP. 199212292019031005

Penguji III

H. Ahmad Khubby Ali Rohmat, S.Ag. M.Si.

NIP. 197809202009011009

Penguji II

Dr. Anis Farida S.Sos, S.H., M.Si

NIP. 197208062014112001

Penguji IV

Fitriana Nur Annisa, S.H., M.Kn

NIP. 199901012025052004

Surabaya, 06 April 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Arini Mayang Fauni
NIM : 05010422005
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : arinymayfa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Implikasi Yuridis Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 Terhadap Syarat Minimal Pendidikan Pejabat Publik dalam Perspektif Meritokrasi

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 April 2026

Penulis

(Arini Mayang Fauni)

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 mengenai syarat minimal pendidikan bagi pejabat publik yang hanya mensyaratkan lulusan SMA sederajat. Putusan ini menimbulkan polemik karena berkaitan dengan penyelenggaraan negara serta kualitas kepemimpinan dan kompetensi pejabat negara dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam perspektif *fiqh siyāsah dustūriyyah*, pemimpin ideal harus memenuhi unsur amanah, keadilan dan kecakapan, serta sesuai dengan lembaga Mahkamah Konstitusi disesuaikan dengan lembaga *Al-Mizam*. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini mengkaji: (1) Bagaimana Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 154/PUU-XXIII/2025 terhadap kualitas pejabat publik perspektif Meritokrasi dan *Good Governance*, dan (2) Bagaimana Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 154/PUU-XXIII/2025 tentang Syarat Minimal Pendidikan Pejabat Publik.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*stute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa putusan terkait dan undang-undang, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan dokumen ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deduktif, penelitian dapat secara sistematis menyelaraskan antara teori Penafsiran Hukum, *Good Governance*, Meritokrasi dan *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah*, sehingga hasilnya menjadi analisis yang terstruktur dan logis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 mempertahankan syarat pendidikan minimal sebagai bagian dari *open legal policy* pembentuk undang-undang. Namun, putusan ini berimplikasi pada lemahnya jaminan meritokrasi dan profesionalitas pejabat publik dalam sistem demokrasi modern, sehingga berpotensi menghambat prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek kompetensi dan profesionalitas pemimpin. Dalam perspektif *fiqh siyāsah dustūriyyah*, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan dan syarat kepemimpinan ideal sebagaimana ditegaskan oleh ulama klasik seperti Al-Mawardi, yang menekankan bahwa pemimpin harus memiliki kecakapan ilmu dan kemampuan mengatur urusan rakyat.

Penulis menyarankan agar pembentuk undang-undang mempertimbangkan reformulasi syarat pendidikan pejabat publik secara lebih proporsional demi mendukung kualitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Mahkamah Konstitusi juga diharapkan lebih konsisten dalam menjaga perannya sebagai *guardian of constitution* dengan mempertimbangkan dinamika sosial-politik dan prinsip kemaslahatan umum. Selain itu, diperlukan penguatan sistem meritokrasi dan pendidikan politik masyarakat agar demokrasi tidak hanya bersifat inklusif, tetapi juga menghasilkan pejabat publik yang kompeten dan amanah.

DAFTAR ISI

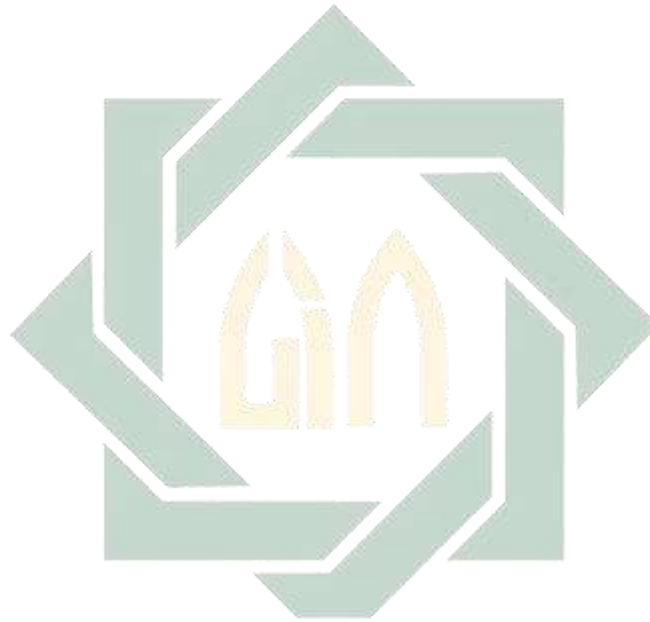
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Landasan Teori.....	19
H. Definisi Operasional.....	24
I. Metode Penelitian.....	26
J. Sistematika Pembahasan	29
BAB II KERANGKA TEORITIS KUALIFIKASI JABATAN PUBLIK OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DAN FIQH <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i>	31
A. Teori <i>Good Governance</i>	31
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	31
2. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	33
B. Sistem Meritokrasi	36
C. Teori Penafsiran Hukum	40
1. Pengertian Penafsiran Hukum	40
2. Penafsiran Hukum Progresif.....	42
D. Fiqh <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	44
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāсах</i>	44
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāсах Dustūriyyah</i>	46

<http://digilib.uinsa.ac.id/> / <http://digilib.uinsa.ac.id/> / <http://digilib.uinsa.ac.id/>

BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 154/PUU-XXIII/2025 DALAM PERSPEKTIF MERITOKRASI DAN GOOD GOVERNANCE	49
A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025	49
1. Latar Belakang <i>Judcial Review</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025	49
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025	52
3. Komparasi Penafsiran Hakim Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 atas Prinsip <i>Open Legal Policy</i>	55
B. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 terhadap Penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan.....	62
1. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 terhadap Tubuh Mahkamah	62
2. Implikasi Syarat Pendidikan Minimal SMA/Sederajat terhadap Kualitas Pejabat Publik Ditinjau dari Sistem Meritokrasi	64
3. Implikasi Syarat Pendidikan Minimal SMA/Sederajat terhadap Kualitas Pejabat Publik Ditinjau dari Prinsip <i>Good Governance</i>	68
BAB IV ANALISIS <i>FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i> PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 154/PUU-XXIII/2025	71
TENTANG SYARAT MINIMAL PENDIDIKAN PEJABAT PUBLIK	71
A. Lembaga Mahkamah Konstitusi dalam Konsep <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyyah</i>	71
B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 dalam Perspektif <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyyah</i>	73
PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.....	57
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

i. Buku

- Busroh Firman Freaddy dan Fatria Khairo. *Memahami Hukum Konstitusi Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta edisi kedua, cetakan ke enam, 2009.
- Mulyawan, Rahman. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Sumedang: Unpad Press, 2015.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan hukum progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi hukum tata negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*. Edisi pertama. Edited by Nunuk Nuswardani. Tapos, Cimanggis, Depok, Indonesia: Kencana, 2017.
- Widiarty Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Republika Global Media, 2024.
- Al-Qur`an Surat An-Nisa` Ayat 58
- Al-Qur`an Surat Al-Baqarah Ayat 247

ii. Jurnal dan Artikel

- Agil Sabani, Naiya Aulia, Nisriinaa Mazaya P, dan Savina Niken M. "Pentingnya Implementasi Sistem Meritokrasi Dalam Instansi Pemerintahan Indonesia." *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia* 1, no. 3 (Juni 2024): 144–52. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.333>.

Aryanto, Wisnu. "Analisis Yuridis Sistem Meritokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia." *Universitas Islam Sultan Agung*

Cahyono Doni dan Endang Indartuti, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance" (Surabaya, Jurnal Penelitian Adminitasi Publik, 2022).

<http://digilib.unisa.ac.id/> <http://digilib.unisa.ac.id/> <http://digilib.unisa.ac.id/>

Darmawan, Dwiky Arief, dan Dany Usmina Wijaya. "Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023." *Gorontalo Law Review* 7, no. 1 (April 2024): 111. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3355>.

Emy Hdanayani dan Alfarado. "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif." *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 27, no. 1 (March 2025): 10–18. <https://doi.org/10.51921/chk.p6mncb10>.

Fadjar Trisakti, Adnin Dikeu Dewi Berliana, Al Bukhori, dan Alya Fitr. "Transparansi dan Kepentingan Umum." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (April 2022): 29–38. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.61>.

Febriyanti, Adha Annisa, dan Dhea Andana Hasyim. "Ibnu Taimiyah's Contribution To Political Strategy In Indonesia" 1, no. 2 (2024).

Fitrianto, Bambang, Zulfa Almira, Ahmad Irham Tajhi, dan Zefri Ansari. "Penafsiran Hakim Terhadap Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023)" 3, no. 6 (2025).

Ghina Aulia Rizky, Muhammad Afriza Rifdany, dan Muhammad Ferdy Hasan, "Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah" (*Palangkar: Jurnal Terapan Hukum Islam*, 2025)

Hayatudin Amrullah dan Panji Adam, "Pengantar Kaidan Fikih" (Jakarta, *Amzah* 2021

Hapsari, Afira Fitri. "Implementasi Kebijakan Sistem Merit dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil Di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga."

Harahap, Munawir, dan Mhd. Yadi Harahap. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan Presidential Threshold Perspektif Siyasah Qadhaiyyah." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 7 (July 2025): 331–49. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i7.4221>

Hukum acara Mahkamah Konstitusi. [Cet. 1.]. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2010.

Imam Al-Mawardi “Kitab Ahkam as-Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam” Penerjemah Khalifurrahman & Fathurrahman (Jakarta, 2014).

Luviana, E., Simanjuntak, R. A. T., & Nainawa, Z, “Relevansi Syarat Pendidikan Minimal Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Tuntutan Perkembangan Zaman Dalam Adaptasi Hukum Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/Puu-Xxiii/2025.” *Journal of Studia Legalia*, 6(1).

Iriawan Heru, “Teori Kebijakan Publik,” (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024).

Iman, Haerul. *Tafsir Ayat tentang Kewajiban Menjalankan Prinsip Amanah dan Keadilan (Q.S. An-Nisa: 58)*. no. 6 (2025).

Ipan Nurhidayat. “Prinsip-Prinsip Good Governance di Indonesia.” *Journal Education dan Government Wiyata* 1, no. 1 (February 2023): 40–52. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5>.

Idrus, Achmad Musyahid. “Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah.” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (December 2021): 123. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.

Jabar, Syabran, dan Aldri Frinaldi. *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*.

Komara Endang, “Pengambilan Keputusan dan Analisis Kebijakan Sektor”. (*Journal Education dan Government Wiyata* 1, no. 1 Tasikmalaya 2023) Luviana, E., Simanjuntak, R. A. T., & Nainawa, Z. (2025).

Khalid, Afif. “Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 6, no. 11 (January 2014). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>.

Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum” (Mataram: Mataram University Pers, 2020)

Muzaki, Achmad, Zefry Luttadinata, Auliya Eka Putri, Maya Ginti Kirana, Rudhlotun Nur Jannah, Muhammad Daniar Firdaus, dan Mukhamad Rifa'i. *Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah*. 7 (2024).

Safitri, Melani, dan Arif Wibowo. "Peranan Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia (Menenal Mahkamah Konstitusi): Constitutional Court, Verdict." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (February 2023): 71–76. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.106>.

Mulyawan Rahman "Sistem Pemerintahan Indonesia" Unpad Press (Sumedang, April 2015).

Sulaiman, Kamal, Oktav Prandana, Muhammad Iqbal Faedillah, Danrew Rearizky, dan Dimas Dwi Haryanto. "Sistem Meritokrasi Dalam Upaya Penerapan *Good Governance* di Indonesia." *Open Access* 8, no. 3 (2025).

Sofyan, Alfin "Analisis Fiqh siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pembatalan Bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," (UINSA, 2022).Affdani, Hernadi. *Political Rights of Civil Servants in Indonesia*. 1, no. 3 (2014).

Agil Sabani, Naiya Aulia, Nisriinaa Mazaya P, dan Savina Niken M. "Pentingnya Implementasi Sistem Meritokrasi dalam Instansi Pemerintahan Indonesia." *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia* 1, no. 3 (June 2024): 144–52. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.333>.

Aryanto, Wisnu. "Analisis Yuridis Sistem Meritokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia." *Universitas Islam Sultan Agung*, n.d.

Darmawan, Dwiky Arief, dan Dany Usmina Wijaya. "Teori *Opened Legal Policy* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Gorontalo Law Review* 7, no. 1 (April 2024): 111. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3355>.

Emy Hdanayani dan Alfarado. "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif." *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum*

- Universitas Wijayakusuma* 27, no. 1 (March 2025): 10–18.
<https://doi.org/10.51921/chk.p6mncb10>.
- Fadjar Trisakti, Adnin Dikeu Dewi Berliana, Al Bukhori, dan Alya Fitr. “Transparansi dan Kepentingan Umum.” *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (April 2022): 29–38.
<https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.61>.
- Febriyanti, Adha Annisa, dan Dhea Andana Hasyim. *Ibnu Taimiyah’s Contribution To Political Strategy In Indonesia*. 1, no. 2 (2024).
- Fitrianto, Bambang, Zulfa Almira, Ahmad Irham Tajhi, dan Zefri Ansari. *Penafsiran Hakim Terhadap Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pemilu 2024 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)*. 3, no. 6 (2025).
- Harahap, Munawir, dan Mhd. Yadi Harahap. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan Presidential Threshold Perspektif Siyasah Qadhaiyyah.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 7 (July 2025): 331–49. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i7.4221>.
- Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. [Cet. 1.]. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Idrus, Achmad Musyahid. “Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (December 2021): 123.
<https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.
- Iman, Haerul. *Tafsir Ayat tentang Kewajiban Menjalankan Prinsip Amanah dan Keadilan (Q.S. An-Nisa: 58)*. no. 6 (2025).
- Ipan Nurhidayat. “Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia.” *Journal Education dan Government Wiyata* 1, no. 1 (February 2023): 40–52.
<https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5>.
- Khalid, Afif. “Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 6, no. 11 (January 2014).
<https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>.

- Leny Nofianti, Anggrieta Denziana. “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dan Profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Terhadap Penerapan Good Government Governance (Ggg).” *UIN Sultan Syarif Kasim*, 2010.
- Longkutoy, Natanael Febryan. “Paradigma Teknokratis: Mengendalikan Atau Dikendalikan Teknologi.” *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja* 6, no. 2 (October 2022): 179–91. <https://doi.org/10.37368/ja.v6i2.431>.
- Mujahidi, Muhammad Ilham. *Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023 Tentang Pengujian Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Skripsi*.
- Munazih, Muflih. “Menilai Kualitas Pemimpin: Fit dan Proper Test dalam Demokrasi Berbasis Moralitas, Intelektualitas, dan Elektabilitas.” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 3 (November 2024): 386. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2370>.
- Nurbaeti, Risqiyah, Wirda Wahyuni, dan Nur Rahmah. *Kedaulatan Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang*. N.D.
- Rahmadani, Dea dana, dan Pipi Susanti. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/Puu- Xxi/2023 Terhadap Integritas Konstitusional*. no. 90 (n.d.).
- Reydonnyzar Moenek, Dadang Suwdana. *Good Governance (Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Yogyakarta, 2019.
- Siahaan, Maruarar. “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009): 357–78. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art3>.
- Situmorang, Danre Ferndano, Azka Afdhalul Rizqullah, Fraja Mulya, Dwi Bakti, dan Bintang Alfath Richard Hukum. *Peran Hukum Progresif dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo*.
- Sulaiman, Kamal, Oktav Prandana, Muhammad Iqbal Faedillah, Danrew Rearizky, dan Dimas Dwi Haryanto. “Sistem Meritokrasi Dalam Upaya Penerapan Good Governance Di Indonesia.” *Open Access* 8, no. 3 (2025).

Sungkar, Alfi Aulia. *Efektifitas Dan Akuntabilitas Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Anggaran Daerah*. 3, no. 3 (2023).

Syaputra, M. Yusrizal Adi, dan Sh Mh. *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi*. 1, no. 2 (2008).

Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi hukum tata negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*. Edisi pertama. Edited by Nunuk Nuswardani. Tapos, Cimanggis, Depok, Indonesia: Kencana, 2017.

Widanti, Ni Putu Tirka. "Konsep *Good Governance* dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur." *Jurnal Abdimas Peradaban* 3, no. 1 (September 2022): 73–85. <https://doi.org/10.54783/ap.v3i1.11>.

Young, Michael. *The Rise of the Meritocracy*. 1st ed. Routledge, 2017. <https://doi.org/10.4324/9781315134642>.

iii. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

iv. Putusan Hakim

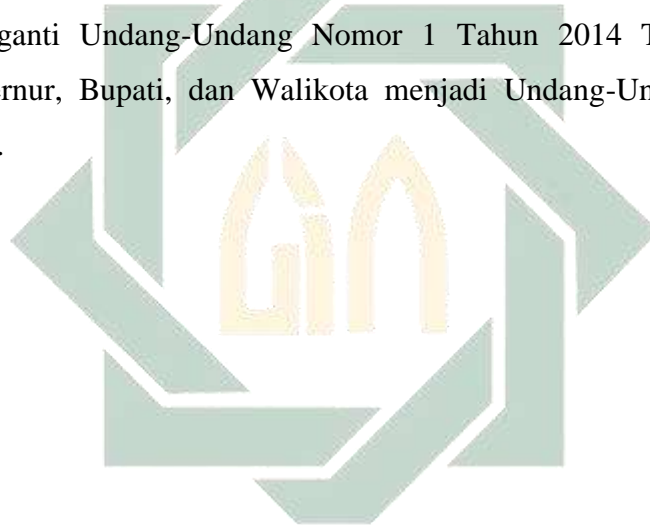
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tanggal 29 September 2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 169 huruf q mengenai usia calon presiden/wakil, tanggal 16 Oktober 2023.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 mengenai presidential threshold, tanggal 20 Agustus 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, 20 Agustus 2024.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A